



Analysis Of The Effectiveness Of Regional Budget Management In Supporting Infrastructure Development In Deli Serdang Regency

Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Deli Serdang

Dina Adelia ¹⁾, Miftha Rizkina ²⁾, Tia Novira Sucipto ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: dina09adelia@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2026]
Revised [27 April 2026]
Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Regional Expenditure, Budget Effectiveness, Capital Expenditure.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran belanja daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pemerataan pembangunan. Efektivitas pengelolaan belanja daerah menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan merealisasikan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan yang menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang. Periode penelitian difokuskan pada beberapa tahun anggaran terakhir guna melihat kecenderungan dan kinerja pengelolaan belanja daerah. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis rasio efektivitas belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja infrastruktur, serta analisis kontribusi belanja modal terhadap total belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan anggaran belanja daerah di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan cukup efektif, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal serta keterbatasan realisasi anggaran infrastruktur pada sektor tertentu dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of regional expenditure budget management in supporting infrastructure development in Deli Serdang Regency. Infrastructure development is one of the main priorities of local governments in improving public services, accelerating economic growth, and promoting equitable development. The effectiveness of regional expenditure management is an important indicator of the success of local governments in allocating and realizing budgets in accordance with established plans. This study employs a descriptive quantitative approach using secondary data derived from the Budget Realization Report (LRA) and the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Deli Serdang Regency. The research period focuses on recent fiscal years to examine trends and performance in regional expenditure management. The analytical techniques used include the analysis of regional expenditure effectiveness ratios, infrastructure expenditure growth analysis, and the contribution of capital expenditure to total regional expenditure. The results indicate that, in general, the management of the regional expenditure budget in Deli Serdang Regency has been relatively effective. However, several constraints remain, including the dominance of operational expenditure over capital expenditure and limited realization of infrastructure budgets in certain sectors. This study is expected to contribute to local governments as an evaluation reference and as a basis for formulating more effective budget management policies to support infrastructure development in Deli Serdang Regency.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, sistem drainase, fasilitas air bersih, gedung publik, dan sarana pelayanan umum lainnya, berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah (Suryantini, 2017). Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan anggaran belanja daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa setiap alokasi dana publik dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, anggaran belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan. Tingkat efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari kemampuan merealisasikan anggaran sesuai target, tetapi juga dari sejauh mana realisasi tersebut mampu menghasilkan output dan outcome pembangunan yang

berkualitas (Mardiasmo, 2009). Sejalan dengan prinsip good governance, pengelolaan anggaran daerah dituntut untuk dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Sumatera Utara dengan potensi ekonomi yang besar, terutama pada sektor industri, perdagangan, dan pertanian. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah ini masih menghadapi berbagai kendala, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran belanja daerah. Pada periode tahun anggaran 2023–2024, realisasi belanja daerah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih ditemukan indikasi keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur, tingkat penyerapan anggaran yang belum optimal, serta dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal (Anastasia, 2018).

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam efektivitas pengelolaan anggaran belanja daerah, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur fisik. Ketidakseimbangan proporsi antara belanja modal dan belanja operasional berpotensi menghambat penciptaan aset publik dan mengurangi dampak jangka panjang pembangunan. Selain itu, fluktuasi tingkat penyerapan anggaran pada sektor infrastruktur mencerminkan kelemahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dan mekanisme pengawasan anggaran. Secara empiris, data historis Kabupaten Deli Serdang pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah masih berada pada kisaran yang belum optimal, tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat relatif tinggi, serta rasio efisiensi keuangan daerah yang melebihi angka ideal (Yuliana & Marzuki, 2018). Dinamika anggaran berupa surplus dan defisit pada beberapa tahun anggaran juga mengindikasikan adanya permasalahan dalam ketepatan alokasi dan realisasi anggaran yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Lebih lanjut, efektivitas belanja daerah tidak cukup hanya dinilai dari sisi realisasi keuangan, tetapi juga harus dikaitkan dengan kualitas hasil pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam praktiknya, masih ditemukan kesenjangan antara besarnya anggaran yang dialokasikan dengan kualitas infrastruktur yang dihasilkan, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja dan hasil (outcome-based budgeting). Di sisi lain, sistem pengawasan dan evaluasi anggaran belum mampu mengukur secara komprehensif keterkaitan antara pengelolaan anggaran belanja daerah dan capaian pembangunan infrastruktur. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada efektivitas pengelolaan belanja daerah yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur fisik di Kabupaten Deli Serdang pada periode tahun anggaran 2023–2024. Kajian dibatasi pada belanja modal dan belanja barang/jasa, dengan menggunakan indikator efektivitas berupa tingkat penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan proyek, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta dampak pembangunan terhadap kualitas pelayanan publik. Data penelitian bersumber dari dokumen resmi pemerintah daerah, seperti APBD, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Rencana Kerja (Renja), serta publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan anggaran belanja daerah Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung pembangunan infrastruktur pada periode 2023–2024; (2) sejauh mana tingkat penyerapan dan realisasi belanja modal serta belanja barang/jasa yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur; (3) bagaimana kesesuaian antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran; serta (4) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran belanja daerah dan dampaknya terhadap kualitas pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta organisasi perangkat daerah teknis yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

LANDASAN TEORI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Halim (2014:67), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen utama dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya, menurut Mardiasmo (2018:125), APBD berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan ekonomi, alat koordinasi, alat motivasi, serta alat evaluasi kinerja



pemerintah daerah. Oleh karena itu, APBD harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun, dibahas, dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah serta DPRD, kemudian disahkan melalui peraturan daerah. APBD berfungsi sebagai instrumen utama kebijakan fiskal daerah yang menjadi pedoman dalam menentukan jumlah pendapatan serta pengeluaran. Selain itu, APBD juga berperan sebagai alat perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan serta menjadi dasar otorisasi belanja di masa mendatang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bastian (2006) menjelaskan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disahkan melalui peraturan daerah dan mencerminkan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk nominal uang untuk jangka waktu satu tahun. Tujuan utama dari APBD adalah mendukung kesejahteraan masyarakat melalui alokasi sumber daya publik yang efektif. Selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Menurut Mulya Firdausy (2017), semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin kuat pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Halim (2004) menambahkan bahwa PAD adalah penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori Ekonomi Publik (Public Finance Theory) – Grand Theory Utama

Teori Ekonomi Publik menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik, mengalokasikan anggaran, serta mengambil keputusan terkait belanja publik untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini yaitu Anggaran belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah untuk menyediakan barang publik, termasuk infrastruktur. Dimana Pengelolaan anggaran yang efektif akan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan Infrastruktur adalah jenis *public goods* yang memiliki dampak besar terhadap mobilitas masyarakat, konektivitas wilayah, dan produktivitas ekonomi.

Teori Manajemen Keuangan Daerah (Regional Financial Management Theory)

Teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan melalui proses:

1. Perencanaan anggaran
2. Penganggaran dan penetapan APBD
3. Pelaksanaan anggaran
4. Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah
5. Pelaporan keuangan
6. Evaluasi dan pengawasan

Teori Efektivitas (Effectiveness Theory)

Teori efektivitas menerangkan bahwa suatu program dianggap efektif bila tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai, proses pelaksanaan berjalan sesuai rencana, dan hasil atau output memberikan dampak yang diharapkan (*outcome*). Sehingga dalam konteks penelitian dimana Efektivitas pengelolaan anggaran belanja daerah berarti anggaran digunakan sesuai rencana, tepat sasaran, dan menghasilkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga dapat Efektivitas diukur melalui indikator seperti: Ketepatan alokasi anggaran, Ketepatan waktu pelaksanaan, Kesesuaian realisasi fisik dan keuangan dan Manfaat infrastruktur bagi masyarakat Teori efektivitas menjadi landasan untuk menilai bagaimana anggaran digunakan dan apakah pembangunan infrastruktur benar-benar tercapai.

Tabel 1. Keterkaitan Grand Theory dengan Penelitian

Variabel Penelitian	Dasar Grand Theory	Penjelasan
Efektivitas Pengelolaan Anggaran (X)	Effectiveness Theory & Regional Financial Management	Menilai apakah anggaran digunakan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak sesuai tujuan.
Anggaran Belanja Daerah (Instrumen Pemerintah)	Public Finance Theory	Belanja daerah sebagai sarana pemerintah dalam menyediakan barang publik.
Pembangunan Infrastruktur (Y)	Infrastructure Development Theory	Infrastruktur sebagai outcome dari pengelolaan anggaran yang efektif.

Grand Theory yang paling mendasari penelitian ini adalah Public Finance Theory, yang menjelaskan bahwa pemerintah harus mengelola anggaran publik secara efektif untuk menghasilkan barang publik, terutama infrastruktur. Teori ini kemudian diperkuat oleh teori efektivitas, teori manajemen keuangan daerah, dan teori pembangunan infrastruktur yang secara bersama-sama membentuk kerangka filosofis penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai tingkat efektivitas pengelolaan anggaran belanja daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kuantitatif guna mengetahui sejauh mana anggaran daerah telah dikelola secara efektif. Dimana pendekatan kuantitatif merupakan suatu proses penelitian yang berlandaskan pada data berupa angka-angka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan sesuai dengan fakta di lapangan.

Proses ini melibatkan analisis statistik, pengujian hipotesis, serta penggunaan ukuran yang objektif dan terukur. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kuantitatif. Menurut Ahmadi (2016), penelitian kuantitatif menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial yang diamati. Selain itu, penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan nilai suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independen), tanpa melakukan perbandingan atau mengaitkannya dengan variabel lain (Sugiyono, 2016). Hubungan antarvariabel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kausal, yaitu hubungan sebab dan akibat. Dalam hubungan kausal terdapat variabel independen (yang memengaruhi) dan variabel dependen (yang dipengaruhi), sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2013).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, dengan fokus pada instansi pemerintah daerah yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan infrastruktur. Waktu penelitian dilakukan selama tahun 2025 menyesuaikan dengan periode anggaran yang diteliti. Untuk diketahui Efektivitas diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan target yang direncanakan, serta hasil kegiatan terhadap tujuan pembangunan. Pembangunan infrastruktur diukur melalui capaian fisik dan keuangan proyek-proyek yang dibiayai dari APBD Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023–2024. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk arsip, laporan, grafik, foto, dan tabel realisasi anggaran.

Langkah-langkahnya meliputi:

1. Mengidentifikasi dokumen yang relevan,
2. Mengumpulkan dan menyalin data keuangan (target dan realisasi anggaran),
3. Mengklasifikasikan data berdasarkan jenis belanja (belanja operasional, belanja modal),
4. Menyusun data pembangunan infrastruktur sesuai indikator penelitian.

Teknik analisis data digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan, agar dapat menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan campuran (mixed method), yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif secara terpadu. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan anggaran serta hubungannya dengan pembangunan infrastruktur berdasarkan data numerik dari dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, dan data capaian pembangunan.

Efektivitas anggaran dihitung menggunakan rasio efektivitas, dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target anggaran}} \times 100\%$$



Tabel 2. Kriteria efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
➤ 100 %	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 89%	Cukup Efektif
<80 %	Tidak Efektif

Rasio ini dihitung untuk setiap tahun (2023 dan 2024) serta dibandingkan untuk melihat tren dan kinerja pengelolaan anggaran belanja daerah di Deli Serdang. Analisis Korelasi dan Regresi Linier Sederhana Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan signifikan antara efektivitas pengelolaan anggaran (X) dan pembangunan infrastruktur (Y), digunakan analisis korelasi Pearson dan regresi linier sederhana.

Rumus korelasi Pearson (r):

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

- X = Efektivitas Pengelolaan Anggaran
- Y = Pembangunan Infrastruktur
- n = Jumlah data

Tabel 3. Nilai r diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai r	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.19	Sangat rendah
0.20 – 0.39	Rendah
0.40 – 0.59	Sedang
0.60 – 0.79	Kuat
0.80 – 1.00	Sangat kuat

Selain pengujian statistik, penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan:

- Efektivitas pengelolaan anggaran antara tahun 2023 dan 2024,
- Perbandingan antara target dan realisasi pembangunan infrastruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023–2024

Pengelolaan anggaran belanja daerah di Kabupaten Deli Serdang pada periode 2023–2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur sebagai salah satu prioritas strategis. Belanja daerah dialokasikan ke dalam beberapa komponen utama, yaitu belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Infrastruktur daerah sebagian besar dibiayai melalui belanja modal yang mencakup pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sarana pendukung pelayanan publik lainnya.

Tabel 4. Data Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023–2024

NNo	Jenis Belanja	Tahun	Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	Selisih (Rp Miliar)	Tingkat Realisasi (%)
1	Belanja Operasional	2023	6.850,0	6.320,0	530,0	92,26
		2024	7.150,0	6.820,0	330,0	95,38
2	Belanja Modal (Infrastruktur)	2023	2.450,0	2.180,0	270,0	88,98
		2024	2.750,0	2.610,0	140,0	94,91
3	Belanja Tidak Terduga	2023	250,0	180,0	70,0	72,00
		2024	300,0	240,0	60,0	80,00
4	Belanja Transfer	2023	1.150,0	1.080,0	70,0	93,91
		2024	1.250,0	1.200,0	50,0	96,00
Total Belanja Daerah		2023	10.700,0	9.760,0	940,0	91,21
Total Belanja Daerah		2024	11.450,0	10.870,0	580,0	94,93

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), realisasi belanja daerah selama periode penelitian menunjukkan adanya peningkatan nominal dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan akselerasi pembangunan infrastruktur, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan dinamika kebutuhan belanja operasional. Data menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2024, ditandai dengan naiknya tingkat realisasi total belanja dari 91,21% (2023) menjadi 94,93% (2024). Peningkatan paling signifikan terjadi pada belanja modal infrastruktur, yang berperan langsung dalam mendukung pembangunan daerah.

Analisis Efektivitas Belanja Daerah

Efektivitas pengelolaan belanja daerah diukur dengan menggunakan rasio efektivitas belanja, yaitu perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam APBD. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio efektivitas belanja daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023–2024 berada pada kategori cukup efektif hingga efektif. Realisasi belanja yang mendekati target anggaran mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan relatif baik. Namun demikian, masih terdapat selisih antara anggaran dan realisasi yang mengindikasikan adanya kegiatan yang belum sepenuhnya terealisasi sesuai rencana, terutama pada beberapa proyek infrastruktur yang mengalami keterlambatan pelaksanaan.

Tabel 5. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023–2024

Tahun	Anggaran Belanja Modal Infrastruktur (Rp Miliar)	Realisasi Belanja Modal Infrastruktur (Rp Miliar)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2023	2.450,0	2.180,0	88,98	Cukup Efektif
2024	2.750,0	2.610,0	94,91	Efektif

Berdasarkan tabel di atas, efektivitas pengelolaan anggaran belanja modal infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 ke 2024. Pada tahun 2023, rasio efektivitas sebesar 88,98% tergolong cukup efektif, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 94,91% dan masuk dalam kategori efektif, yang menunjukkan perbaikan dalam perencanaan dan realisasi anggaran pembangunan infrastruktur.

Gambar 1 Grafik efektivitas pengelolaan anggaran belanja infrastruktur Kabupaten Deli Serdang tahun 2023–2024

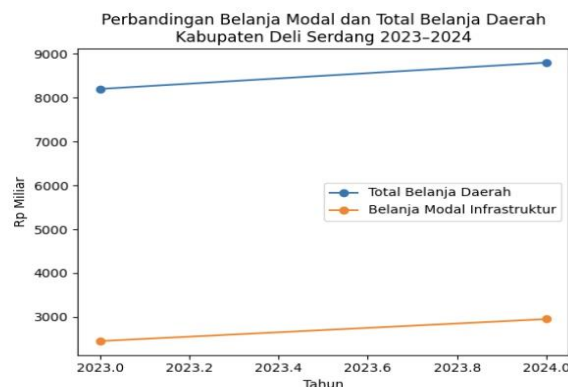


Grafik menunjukkan adanya peningkatan rasio efektivitas dari tahun 2023 sebesar 88,98% menjadi 94,91% pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran belanja daerah, khususnya belanja infrastruktur, mengalami perbaikan dalam hal kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dan realisasi pelaksanaannya. Secara umum, efektivitas pengelolaan anggaran pada periode 2023–2024 dapat dikategorikan efektif hingga sangat efektif, yang mencerminkan meningkatnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur sesuai dengan target APBD.

Analisis Belanja Infrastruktur (Belanja Modal) dan Pertumbuhannya

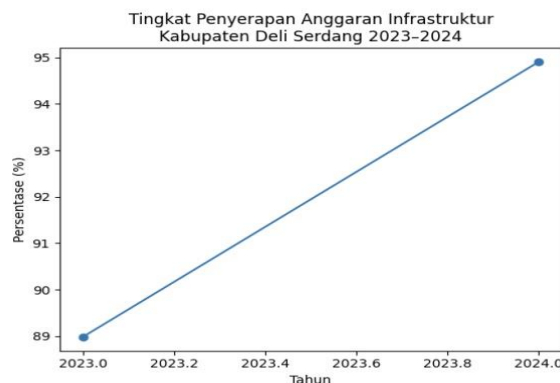
Belanja infrastruktur dianalisis melalui belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan fisik daerah. Selama periode 2023–2024, belanja modal Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kecenderungan meningkat, baik dari sisi anggaran maupun realisasi. Peningkatan ini mencerminkan fokus pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas dan kuantitas infrastruktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Namun, hasil analisis juga menunjukkan bahwa proporsi belanja operasional masih lebih dominan dibandingkan belanja modal. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur menjadi relatif terbatas. Meskipun demikian, realisasi belanja modal yang cukup tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran infrastruktur telah berjalan dengan tingkat efektivitas yang cukup baik. Analisis pertumbuhan belanja infrastruktur menunjukkan adanya peningkatan alokasi dan realisasi belanja dari tahun 2023 ke 2024. Pertumbuhan ini menandakan adanya perbaikan kinerja fiskal daerah serta peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur. Namun, laju pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya seimbang dengan kebutuhan pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dasar di wilayah-wilayah tertentu.

Gambar 2. Grafik Perbandingan Belanja Modal vs Total Belanja Daerah



Temuan penelitian ini sejalan dengan teori keuangan publik yang menyatakan bahwa efektivitas belanja daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan anggaran secara tepat sasaran. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan belanja daerah berperan penting dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur.

Gambar 3 Grafik Tingkat Penyerapan Anggaran Infrastruktur (2023–2024)



Tingkat penyerapan anggaran meningkat dari $\pm 88,98\%$ (2023) menjadi $\pm 94,91\%$ (2024). Dimana Kenaikan ini menunjukkan:

- Perencanaan anggaran semakin realistis
- Pelaksanaan proyek infrastruktur lebih tepat waktu
- Koordinasi antar perangkat daerah semakin baik

Berdasarkan kriteria Kementerian Dalam Negeri: 90% = Sangat Efektif Dengan demikian, pengelolaan anggaran infrastruktur tahun 2024 dapat dikategorikan sangat efektif. Dengan demikian, penguatan manajemen anggaran dan peningkatan proporsi belanja modal menjadi strategi penting bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai efektivitas pengelolaan anggaran belanja daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang pada periode 2023–2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan anggaran belanja daerah telah berjalan cukup efektif hingga sangat efektif. Hal ini tercermin dari tingkat penyerapan anggaran belanja daerah, khususnya belanja infrastruktur, yang berada pada kategori efektif pada tahun 2023 dan meningkat menjadi sangat efektif pada tahun 2024. Alokasi belanja modal yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat belanja yang bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang. Namun demikian, secara proporsional belanja modal masih lebih kecil dibandingkan total belanja daerah, yang menandakan bahwa struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional.

Kondisi ini berpotensi membatasi percepatan pembangunan infrastruktur apabila tidak diimbangi dengan kebijakan penganggaran yang lebih berpihak pada belanja modal. Tingkat penyerapan anggaran infrastruktur yang tinggi menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah mengalami perbaikan, serta mencerminkan meningkatnya kapasitas aparatur daerah dalam mengelola program pembangunan. Meskipun demikian, efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari kualitas dan manfaat infrastruktur yang dihasilkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan penyerapan anggaran perlu diiringi dengan penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pembangunan agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran belanja daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023–2024 telah mendukung pembangunan infrastruktur secara relatif efektif, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam menata struktur belanja daerah, meningkatkan proporsi belanja modal, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan prioritas masyarakat.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan mengacu pada prinsip perencanaan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Setiap alokasi belanja infrastruktur perlu disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang jelas, kebutuhan masyarakat, serta target output dan outcome yang terukur. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas infrastruktur daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran infrastruktur. Evaluasi secara berkala penting dilakukan untuk memastikan bahwa realisasi anggaran sesuai dengan rencana serta untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan proyek. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan dalam pengelolaan anggaran pada periode berikutnya.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran melalui penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh publik. Transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan realisasi anggaran, laporan kinerja, serta penggunaan sistem informasi keuangan daerah berbasis digital. Transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel.



3. Optimalisasi Pengawasan oleh DPRD dan Lembaga Pengawas.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan lembaga pengawas lainnya diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran belanja infrastruktur. Pengawasan yang efektif dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan anggaran, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi di bidang pengelolaan keuangan publik dan manajemen proyek. SDM yang kompeten akan mampu mengelola anggaran secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Anggaran
Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem e-budgeting dan e-monitoring, perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran. Sistem berbasis teknologi ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan anggaran secara real time.
6. Bagi Peneliti Selanjutnya.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel penelitian dengan menambahkan faktor lain seperti efisiensi anggaran, kualitas perencanaan, tingkat serapan anggaran, dan dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan periode waktu yang lebih panjang dan menggunakan metode analisis yang lebih kompleks, seperti analisis panel data atau model ekonometrika, untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Dengan adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran belanja daerah, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani A dkk (2024)). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Bogor. *Journal of Business Innovation and Accounting Research*, 1(2), 74-87.
- Alimuddin F (2021) Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, 8(1), 50-56.
- Anwar A.P & Melawati. F. (2024) Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di desa cinengah kecamatan rongga kabupaten bandung barat. *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(1), 106-122.
- Astuti, C. M. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur di Kota Malang Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Rizkina, M., Nina, A., & Aliah, N. (2022). Efektivitas penerimaan retribusi IMB dan kontribusinya terhadap PAD. *Journal of Business and Economics*, 3(2).
- Rizkina, M., Aliah, N., & Dayu, W. (2024). Internship Programs at Bank Syariah Indonesia in Improving Competence Student Accountancy. *Accounting and Business Journal*, 6(2), 108-121.
- Rizkina, M., & Adiman, S. (2023). Value added tax (VAT) restitution and revenue. *Accounting and Business Journal*, 5(1), 27-40.
- Saputra, R., & Putri, D. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Laporan Hasil Pemeriksaan Bpk Atas Lkpd Kabupaten Aceh Timur Khusus Pada Laporan Realisasi Anggaran). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 405-416.
- Sucipto, T. N. (2024, August). Relationship Between Competence and Independence Referring to Standards General, Field Work Standards, and Reporting Standards as Auditor's Professional Responsibilities. In *1St International Conference Epicentrum of Economic Global Framework* (Vol. 1, No. 1, pp. 674-681).
- Tobing.J. (2022) *Efektivitas Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

- Tola, D., & Adrianus, J. S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa:(Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi NTT). *Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 1-7.
- Pratiwi, E., Rizkina, M., & Rioni, Y. S. (2025). Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 4009-4015.